

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk memahami dan menganalisis Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah hukum Jambi., 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja Kendala Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah hukum Jambi: 1) Bagaimana peran Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah hukum Jambi. 2) Apa saja kendala dalam Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah hukum Jambi 1) Bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi tentunya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pemutusan hubungan kerja. Dinas Tenaga Kerja telah melakukan tugasnya dengan memberikan informasi dan saran secara teknis kepada pengusaha dan pekerja tentang hal-hal yang dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undangan Ketenagakerjaan. Tentang bentuk pengawasan ketenagakerjaan langsung dan tidak langsung. Pengawas dapat terjun langsung ke perusahaan yang ingin mereka tangani atau tanpa izin perusahaan.2) Kendala dalam Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja, Kendala internal yang dihadapi dalam pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan adanya kegiatan didalam maupun luar kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Sedangkan kendala eksternal adalah adanya penolakan beberapa perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan.

Kata kunci : *Peranan,Proses, Pengawasan, Pemutusan Hubungan Kerja*

ABSTRACT

This research aims: 1) To understand and analyze the supervision carried out by the Manpower Service regarding layoffs (PHK) in the Jambi jurisdiction. Jambi: 1) What is the role of supervision carried out by the Manpower Service regarding termination of employment (PHK) in the Jambi jurisdiction. 2) What are the obstacles in the supervision carried out by the Manpower Service regarding termination of employment (PHK) in the Jambi jurisdiction? 1) The field of supervision of the Jambi Provincial Manpower Service certainly has a very important role and function in termination of employment relations. The Manpower Service has carried out its duties by providing information and technical advice to employers and workers on matters that can ensure the effectiveness of the implementation of the Manpower Law. About direct and indirect forms of labor inspection. Inspectors can go directly to the company they want to work with or without the company's permission. 2) Constraints in Supervision carried out by the labor department. Internal constraints faced in supervising Employment Terminations (PHK) are the limited number of labor inspection employees and the existence of activities within and outside the office of the Jambi Province Manpower and Transmigration Service. Meanwhile, the external obstacle is the refusal of several companies to be inspected by labor inspectors.

Keywords: Role, Process, Supervision, Termination of Employment Relations